



Hegemonic Practices in Hussein Al-Wad's Sa'adatuhu As-Sayyidul Wazir Novel

Rizqi Handayani*
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Jakarta, Indonesia
rizqi.handayani@uinjkt.ac.id

Ahmad Syafa'at Junaid
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Jakarta, Indonesia
ahmad.syafaat16@mhs.uinjkt.ac.id

Abstract

Purpose

This article aimed to describe the hegemonic efforts made by the ruling regime in strengthening its power, as recorded in the novel Sa'adatuhu As-Sayyidul Wazir. This article also revealed the social problems that occurred in Tunisia as a result of the application of the hegemony that was exercised during the regime of Zine El Abidine Ben Ali.

Method

This qualitative study used a library research design that relied on the novel Hussein El-Wad's Sa'adatuhu As-Sayyidul Wazir as the primary data source, while the secondary data sources were various literature in the form of books, articles, websites and other information related to the research topic.

Results/Findings

The study revealed the problem of hegemonic practices carried out by authoritarian regimes for decades, both in civil society and political society. The long-standing authoritarian rule had resulted in the country to cope with various problems, such as rampant corruption, increasing unemployment rates, and the deprivation of civil rights of Tunisian citizens.

Conclusion

The practice of hegemony as a power strategy carried out by the ruling regime, Zainal Abidin bin Ali, did not work well, as a result various social problems emerged which resulted in the collapse of power and public trust in his government.

Keywords

hegemony, Arabic novel, social reality, Tunisia

*) Corresponding Author

Abstrak

Tujuan

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya-upaya hegemoni yang dilakukan oleh rezim penguasa dalam mengukuhkan kekuasaannya, sebagaimana yang direkam dalam novel Sa'adatuhu As-Sayyidul Wazir. Selain itu, artikel ini juga akan mengungkap realitas dan persoalan sosial yang terjadi di Tunisia sebagai dampak dari penerapan hegemoni yang dipraktikkan pada masa rezim Zainal Abidin bin Ali.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang menjadikan novel Sa'adatuhu As-Sayyidul Wazir karya Hussein Al-Wad sebagai sumber data primer, sementara sumber data sekundernya adalah berbagai literatur baik yang berupa buku, artikel, website dan lainnya yang terkait dengan topik penelitian.

Hasil/Temuan

Berdasarkan hal tersebut, maka artikel ini mengungkap persoalan praktik hegemoni yang dilakukan oleh rezim otoriter selama puluhan tahun baik pada wilayah masyarakat sipil maupun wilayah masyarakat politik. Adapun kekuasaan otoriter yang berlangsung lama mengakibatkan negara dihadapkan pada berbagai persoalan, seperti korupsi yang merajalela, tingkat pengangguran yang semakin meningkat, serta perampasan hak-hak sipil warga negara Tunisia.

Kesimpulan

Praktik hegemoni sebagai strategi kekuasaan yang dijalankan oleh rezim penguasa, Zainal Abidin bin Ali, tidak bekerja dengan baik, akibatnya muncul berbagai persoalan sosial yang berakibat pada runtuhnya kekuasaan dan kepercayaan publik terhadap pemerintahannya.

Kata Kunci

hegemoni, novel Arab, realitas sosial, Tunisia

المخلص

الهدف

يهدف هذا المقال إلى وصف جهود الهيمنة التي يبذلها النظام الحاكم في تعزيز سلطته، كما هو مسجل في رواية سعادته السيد الوزير. بالإضافة إلى ذلك، سيكشف هذا المقال أيضًا عن الحقائق والمشاكل الاجتماعية التي حدثت في تونس نتيجة لتطبيق الهيمنة التي مورست في عهد نظام زين العابدين بن علي.

الطريقة

هذا البحث عبارة عن بحث مكتبة يستخدم رواية سعادته السيد الوزير لحسين الواد كمصدر أساسي للبيانات، بينما مصادر البيانات الثانوية هي أدبيات متنوعة في شكل كتب ومقالات ومواقع إلكترونية وغيرها.

النتائج

يكشف هذا المقال عن مشكلة ممارسات الهيمنة التي مارسها الأنظمة الاستبدادية على مدى عقود، سواء في مجال المجتمع المدني أو المجتمع السياسي. وأدى الحكم الاستبدادي الذي طال أمده إلى مواجهة البلاد مشاكل مختلفة، مثل تفشي الفساد، وزيادة معدلات البطالة، وحرمان المواطنين التونسيين من الحقوق المدنية.

الخلاصة

لم تنجح ممارسة الهيمنة كإستراتيجية قوة نفذها النظام الحاكم زين العابدين بن علي بشكل جيد، مما أدى إلى ظهور مشاكل اجتماعية مختلفة أدت إلى انهيار السلطة وثقة الجمهور في حكومته.

الكلمات الرئيسية

الهيمنة، الرواية العربية، الواقع الاجتماعي، تونس

PENDAHULUAN

Tragedi Arab Spring atau Musim Semi Arab (الربيع العربي) yang terjadi di dunia Arab pada tahun 2011, khususnya di Tunisia, mendapatkan perhatian dan respon yang cukup besar dari para pemerhati Timur Tengah. Beberapa tulisan merekam kondisi Tunisia yang tengah berada dalam kondisi yang keos. Catatan-catatan gelap terkait kondisi perekonomian yang buruk, perilaku korupsi dan penggelapan yang dilakukan para elite pemerintahan, pembunuhan Chokri Belaïd, seorang pemimpin oposisi Tunisia yang dibunuh pada tahun 2013, serta aksi bakar diri seorang pedagang buah dan sayur, Mohamed Bouazizi pada 17 Desember 2010, semua tak luput menjadi isu dan perhatian (Affan, 2018, p. 81; Daud, 2016; Jaquette dan Youssef, 2016).

Berbagai tulisan dan karya sastra berupaya untuk merespon dan merekam berbagai peristiwa bersejarah dan perubahan sosial yang terjadi pada masa itu di Tunisia. Di antaranya adalah syair yang disenandungkan oleh penyair Tunisia Abu al-Qasim al-Shabbi, Syakib Daud dalam komik grafisnya *'The Dump'*, Anis Syaussyan dalam puisinya في احترام للفقيه, Novel *Al-Thaliyâniy* karya Syukrî Al-Mabkhût, dan Hussein Al-Wad dalam novelnya *Sa'âdatuhu As-Sayyidul Wazîr* (Fadhil, et.al., 2017, pp. 1–20; Anisa dan Arifiany, 2019, pp. 448–461; Jaquette dan Youssef, 2016). Sehubungan dengan novel *Sa'âdatuhu As-Sayyidul Wazîr*, dalam salah satu tulisannya Abdurrahman Muhammad Altmara melihat bahwa novel tersebut menjadi catatan tentang kebobrokan yang terjadi dalam pemerintahan Tunisia. Dalam tulisan tersebut, kebobrokan pemerintahan Tunisia direpresentasikan oleh salah seorang perdana menteri yang korup. Perilaku korupsi tersebut terlihat dari pelayanan dan pengelolaan urusan publik yang berpusat pada kesenangan dan kepentingan individual, serta pergeseran peran dan fungsi guru akibat dari kepentingan politik. Terdapat tiga hal persoalan yang dapat dicatat Altmara dari novel *Sa'âdatuhu As-Sayyidul Wazîr*, yaitu: mengenai politik yang berpusat pada menteri yang korup, kekuasaan sebagai sistem yang menghasilkan ketidakadilan dan berimplikasi pada kebobrokan sistem pemerintahan, serta tentang isu korupsi (Altmara, 2016).

Tentu saja, pandangan al-Shabbi, Syakib Daud, Hussein Al-Wad, dan Altmara tentang Tunisia merupakan sebagian kecil dari gambaran realita sosial yang terjadi dalam masyarakat Tunisia. Kehadiran karya-karya sastra tersebut dapat dijadikan sebagai dokumen sosial yang merekam berbagai tragedi dan peristiwa bersejarah. Selain itu, kelahiran karya sastra merupakan respon pengarang atas realitas-realitas sosial yang dihadapinya selama proses penciptaan karya sastra. Dalam proses penciptaan karya sastra pengarang sebagai anggota masyarakat sangat dipengaruhi oleh latar sosial dan budaya yang melatarinya. Untuk itulah maka karya sastra tidak pernah lahir dari kekosongan budaya, karena pengarang dianggap sebagai *a silent being*, di mana pengarang sebagai anggota masyarakat mengalami sensasi-sensasi dalam kehidupannya bermasyarakat. Pengalaman tersebut ikut mempengaruhinya dalam proses penciptaan karya sastra. Berdasarkan hal tersebut, novel dianggap sebagai cermin dan dokumen sosial yang merekam setiap realitas kehidupan sosial dan persoalan sosial di mana karya sastra tersebut dilahirkan (Endraswara, 2003, p. 78). Sebagai dokumen sosial, sastra dan masyarakat memiliki hubungan yang timbal balik, di mana karya sastra menghadirkan realita-realita sosial yang mencerminkan kehidupan pengarang, sedangkan pengarang dalam proses penciptaan karya sastranya dipengaruhi oleh iklim sosial, politik, dan budaya yang melatarinya. Artinya, karya sastra merupakan refleksi sosial masyarakat dan memiliki hubungan yang sangat erat dengan masyarakat, karena dalam karya sastra terdapat berbagai persoalan sosial yang sebagian besar terlahir dari realita sosial yang ada. Selain itu, ada beberapa hal yang membuat karya sastra dengan masyarakat memiliki hubungan erat, di antaranya yaitu karya sastra hidup dalam masyarakat, menyerap aspek-aspek kehidupan yang terjadi dalam masyarakat, dan karya sastra juga mengandung berbagai macam persoalan sosial yang terjadi dalam masyarakat (Ratna, 2013, pp. 332–333).

Tunisia sebagai realitas sosial yang diangkat dalam novel *Sa'âdatuhu As-Sayyidul*

Wazîr merupakan potret Tunisia dalam pandangan Hussein Al-Wad yang mengalami gelombang revolusi 2011 di bawah rezim kekuasaan Zainal Abidin bin Ali. Zainal Abidin bin Ali memegang kekuasaan sejak tahun 1987 sampai 14 Januari 2011 (As-Sirjani, 2011, pp. 61–62). Kekuasaan yang berlangsung lama mengindikasikan adanya upaya-upaya mempertahankan hegemoni di dalam suatu negara baik pada wilayah masyarakat politik dan masyarakat sipil. Misalnya pada wilayah masyarakat politik, Zainal Abidin bin Ali menerapkan kebebasan politik yang terbatas, yang memungkinkan pihak atau partai lain untuk bersaing dalam pemilihan. Namun realitanya kebebasan ini tidak berlangsung lama ketika terdapat indikasi keberhasilan pemilihan Partai Islam Ennahda pada tahun 1989 yang dapat mengancam posisi rezim penguasa di Tunisia (Diagnostic, 2015, p. 133). Sedangkan pada wilayah masyarakat sipil, Zainal Abidin bin Ali menerapkan kebijakan tangan besi, melakukan berbagai penindasan, penganiayaan, bahkan pembunuhan yang dilakukan oleh aparat keamanan negara terhadap siapapun yang menentang kekuasaannya. Kediktatoran rezim Zainal Abidin bin Ali dalam berurusan dengan rakyat, negara dihadapkan berbagai risiko dan bahaya, di antaranya yaitu penyebaran korupsi, pembunuhan kritikus dan aktivis politik, penangkapan, penahanan, pengasingan, pelecehan seksual, serta pelanggaran hak-hak sosial, ekonomi, sipil, dan politik warga Tunisia (Carranza dan Zouari, 2020, p. 2).

Pada dasarnya dominasi menggunakan kekerasan bukan merupakan strategi efektif untuk memenangkan kekuasaan, sebagaimana konsep hegemoni Antonio Gramsci yang lebih menekankan kepemimpinan intelektual daripada dominasi dengan kekerasan. Suatu kelompok sebelum memenangkan kekuasaan harus menjalankan kepemimpinan, dan ketika kekuasaan sudah dimenangkan maka kepemimpinan itu harus tetap dijalankan untuk mempertahankan kekuasaan (Gramsci, 2013/2011, p. 285).

Runtuhnya kekuasaan Zainal Abidin bin Ali pada tahun 2011 tidak terlepas dari faktor ekonomi negara yang memburuk. Mulai tahun 2000an, pengangguran massal di Tunisia menyebar luas sampai ke kalangan lulusan universitas dan ekonomi Tunisia secara bertahap mengalami pergeseran ke arah kapitalisme kroni yang hanya menguntungkan keluarga presiden dan sekutunya melalui perkawinan atau bisnis (Gherib, 2020, pp. 6–7). Hal tersebut mengakibatkan lahirnya momen kesadaran politik koleratif di dalam masyarakat yang dapat membentuk suatu hubungan kekuatan-kekuatan hegemoni tandingan. Gramsci merumuskan bahwa momen kesadaran yang paling rendah yaitu momen ekonomi-koorporasi, anggota dari suatu kelompok memiliki solidaritas dengan sesama anggota profesinya dan sadar akan kepentingan kelompok profesinya. Momen kedua adalah tercapainya kesadaran solidaritas tidak hanya pada kepentingan suatu kelompok profesi, akan tetapi sadar akan kepentingan semua anggota kelas sosial yang lain juga. Dan momen ketiga adalah orang-orang mulai sadar akan kepentingan koorporasinya, menjadi kepentingan dari berbagai kelompok (Gramsci, 2013/2011, p. 249). Momen ini ditandai dengan solidaritas kelompok pedagang Tunisia atas aksi Muhammad Bouazizi membakar diri sebagai bentuk protes terhadap rezim penguasa yang pada akhirnya meletus menjadi kekuatan yang besar dan dapat meruntuhkan kekuasaan Rezim Zainal Abidin bin Ali (Al-Zain, 2013, p. 21).

Berdasarkan persoalan-persoalan di atas, salah satu akar permasalahan dari persoalan Tunisia adalah hegemoni dan penyelewengan kekuasaan, dan ini menjadi perhatian novel *Sa'adatuhu As-Sayyidul Wazîr* karya Hussein Al-Wad. Novel ini diterbitkan oleh *Dâr al-Janub li al-Nasyr* pada tahun 2011 di Tunisia. Hussein Al-Wad melalui novelnya menggambarkan korupsi di dalam negara yang dilakukan oleh presiden beserta menteri-menterinya yang mengakibatkan kerugian negara. Ekonomi negara yang memburuk menjadikan terjadinya krisis hegemoni yang dialami oleh rezim penguasa, yang mana rezim penguasa kehilangan legitimasinya dan melakukan upaya-upaya untuk tetap mempertahankan kekuasaannya.

Dalam perkembangannya, persoalan Tunisia menjadi perhatian khalayak dunia. Kehadiran artikel ini berupaya untuk menghadirkan pandangan yang berbeda dari tulisan terdahulu yang berfokus pada persoalan korupsi sebagai akibat dari kegagalan sistem

politik yang diterapkan oleh pemerintahan Tunisia. Artikel ini akan mendeskripsikan bagaimana hegemoni yang dijalankan rezim penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya, dan melihat berbagai realitas serta persoalan sosial yang muncul akibat praktik hegemoni tersebut, sebagaimana yang direkam dalam novel *Sa'adatuhu As-Sayyidul Wazir* karya Hussein Al-Wad. Untuk itu, maka artikel ini akan menggunakan pendekatan sosiologi sastra untuk melihat hubungan sastra dan masyarakat, serta melihat sastra sebagai dokumen sosial untuk memotret realitas masyarakat yang melatarbelakangi proses penciptaan karya sastra.

METODE

Artikel ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu dengan memahami fenomena kebahasaan dan kesusastraan yang dialami peneliti sebagai subjek penelitian. Untuk itu, dalam hal ini peneliti menjadi instrument kunci yang berfungsi untuk mengumpulkan data sekaligus memaknainya dengan menggunakan pendekatan sosiologi sastra. Penelitian ini juga penelitian kepustakaan yang menggunakan berbagai data dan informasi terkait objek penelitian baik berupa buku, artikel, serta literatur-literatur yang terkait dengan topik penelitian (Semi, 2012, p. 10). Dengan demikian, terdapat dua sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah Novel *Sa'adatuh Al-Sayyid al-Wazir* karya Hussein Al-Wad, sementara sumber data sekunder berupa informasi yang peneliti temukan dari berbagai literatur, baik dalam bentuk buku, artikel, majalah, berita, website dan lain sebagainya.

Dalam proses pengumpulan data, penulis membaca novel dengan pembacaan kritis, lalu mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mencatat data-data yang berupa narasi-narasi yang berkaitan dengan isu-isu hegemoni. Data-data tersebut dianalisis secara kritis dengan pendekatan sosiologi sastra dalam prespektif Rene Wellek dan Austin Warren. Wellek dan Warren mengklasifikasikan pendekatan sosiologi sastra menjadi tiga. *Pertama*, sosiologi pengarang yaitu pendekatan terhadap posisi pengarang sebagai penghasil karya sastra serta sebagai anggota masyarakat yang memiliki latar belakang sosial, ideologi, politik dan lain-lain. *Kedua*, sosiologi karya sastra yakni pendekatan terhadap isi karya sastra itu sendiri dan apa yang menjadi tujuannya serta hal-hal yang tersirat di dalamnya. *Ketiga*, sosiologi pembaca yaitu pendekatan mengenai dampak karya sastra terhadap pembaca dan sejauh mana karya sastra membawa perubahan dan perkembangan sosial (Wellek dan Warren, 1989, p. 100). Berdasarkan klasifikasi tersebut, sosiologi karya sastra menjadi fokus pendekatan dalam artikel ini dengan menempatkan isi karya sastra itu sendiri sebagai objek utama dan menghubungkannya dengan realitas sosial yang terjadi di luar karya sastra.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum tentang Novel *Sa'adatuhu As-Sayyidul Wazir*

Novel *Sa'adatuhu As-Sayyidul Wazir* dikenal sebagai novel politik karena narasi di dalamnya sarat dengan peristiwa dan sistem politik yang korup di dunia Arab. Novel tersebut memiliki ciri kematangan pengalaman penulisnya, yang membuat pembaca merasa bahwa novel ini ditulis untuk orang dewasa, karena kematangan dan kedalaman analisis Hussein Al-Wad terhadap fenomena korupsi dan sistem politik di negara Tunisia. Menurutnya, Tunisia adalah salah satu negara yang didominasi oleh praktik korupsi sebagai akibat dari kegagalan sistem pemerintahan di dalamnya (Al-Salem, 2013). Novel *Sa'adatuhu As-Sayyidul Wazir* diterbitkan oleh *Dār al-Janub li al-Nasyr* pada tahun 2011 di Tunisia dan pernah dinominasikan dalam penghargaan buku internasional untuk fiksi Arab pada tahun 2013 (Ammar, 2013).

Secara umum novel ini menggambarkan kehidupan dan perilaku rezim penguasa yang

korup selama puluhan tahun, hingga memicu terjadinya gerakan-gerakan protes dari masyarakat sipil atas ketidakadilan, penindasan dan tirani penguasa. Ketika krisis mencapai puncaknya dan ketika korupsi menjadi tidak tertahankan, maka gerakan-gerakan tersebut berkembang menjadi gerakan besar yaitu revolusi. Hal menakjubkan yang dihadirkan novel ini adalah mengenai narasi-narasi yang dibangun oleh Hussein Al-Wad tidak menceritakan keadaan yang sudah terjadi dan berakhir, akan tetapi novel ini mengantisipasi sejarahnya dengan menghadirkan realita dan cerita secara mengejutkan. Novel ini menjadi proyek Hussein Al-Wad dalam mengkonstruksi sejarah politik Tunisia (Ali, n.d.). Hal tersebut juga dapat dibuktikan dari perkataan Al-Mabkhout dalam Kamal bahwa Hussain Al-Wad menulis novel ini bertahun-tahun sebelum revolusi Tunisia. Pada saat menulis novel tersebut ia terinspirasi dari berbagai berita yang beredar tentang keadaan korupsi, perampokan, dan skandal pemimpin dan keluarga kerajaannya, serta para menteri (Riahi, 2012).

Pada dasarnya masyarakat sudah lama menyadari perilaku korup di lingkungan rezim penguasa, namun selama bertahun-tahun dominasi rezim penguasa sangat kuat. Melalui novel *Sa'ādātu As-Sayyidul Wazīr* juga kita dapat mengetahui bahwa pecahnya revolusi untuk menggulingkan rezim tidak dicapai dengan mudah, terdapat perjuangan masyarakat sipil yang dilakukan sebelumnya selama bertahun-tahun. Hal tersebut dinarasikan dalam novel melalui gerakan-gerakan protes yang dilakukan oleh masyarakat sipil terhadap rezim penguasa. Kekuasaan rezim penguasa dapat bertahan lama dikarenakan adanya upaya hegemoni yang dilakukan oleh rezim penguasa dalam mempertahankan kekuasaannya terhadap masyarakat sipil.

Biografi 'Hussein Al-Wad': Riwayat Pendidikan, Karya, dan Konteks Sosial

Hussein Al-Wad adalah salah seorang sastrawan Tunisia yang lahir di Moknine, Provinsi Monastir, Tunisia. Ia lahir pada pertengahan abad kedua puluh, tepatnya tanggal 20 Maret 1948 dan wafat pada tanggal 2 Juni 2018, pada usia 70, setelah berjuang melawan penyakitnya (Al-Tarhouni, 2018). Ia tumbuh dan menyaksikan beberapa fase pergolakan politik di negaranya, mulai dari masa kolonialisme Perancis, masa rezim otoriter, masa revolusi, sampai masa pasca revolusi. Bahkan, ia dan keluarganya ikut mengalami dampak dari kolonialisme Prancis yang membuat kondisi perekonomian keluarganya memburuk. Ayahnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh pemerintahan Prancis, namun ia dapat melarikan diri dari penjara dengan menyuap penjaga pos penjara (Gana, 2014).

Saat ia duduk di bangku sekolah, ia memiliki guru yang selalu memberikan motivasi murid-muridnya untuk menjadi akademisi dan sastrawan. Agaknya pengaruh dari gurunya inilah yang kemudian membuat Hussein Al-Wad tertarik untuk melanjutkan studinya ke Universitas Tunisia pada Oktober 1967. Di universitas ini ia belajar di Fakultas Seni Rupa, Jurusan Bahasa Arab. Ia menaruh minat pada dunia sastra dan menggagumi pendekatan strukturalisme, terlihat pada tahun 1971, ia menyelesaikan pendidikannya di Universitas Tunisia dengan tugas akhirnya yang berjudul *Al-Manhaj Al-Syawlānī li Al-Rihlah fī Risālah Al-Ghufrān* (Gana, 2014). Ia melanjutkan studinya hingga memperoleh gelar doktor di bidang bahasa dan sastra Arab dari Universitas Tunisia pada tahun 1987, dengan disertasinya yang populer di dunia Arab, yang berjudul *Al-Mutanabbi wa Al-Tajribah Al-Jamāliyah 'inda Al-'Arab: Talaqqiya Al-Qudamā li Syi'rihi*. Gelar profesornya diraihnya pada tahun 1992 ("Al-Alekso Tan'ā Al-Akādīmī wa Al-Nāqid wa Al-Rawāiy Al-Tūnisī Al-Duktūr Hussein Al-Wad," 2018).

Hussein Al-Wad memiliki kontribusi yang cukup besar bagi perkembangan kritik sastra Arab. Selain menjadi dosen sastra di Universitas Tunisia, ia juga menjadi peneliti Arab pertama yang menggunakan pendekatan Modern dalam pembacaan teks naratif kuno. Dengan menggunakan pendekatan strukturalisme dan perangkat teoritisnya ia menganalisis struktur naratif dalam *Risālah Al-Ghufrān (An-Nadwah Al-Dauliyah Hussein Al-Wad Bāhitsan wa Mabda'an*, 2018). Selain itu, karyanya yang berjudul *Fī Tārīkh*

Al-Adab Mafāhīm wa Manāhij menjadi salah satu referensi yang menjadikan sejarah sastra sebagai metode dalam proses kritis yang berkontribusi besar pada pembaca sastra (Hanawi, 2021, p. 32).

Hussein Al-Wad dikenal sebagai pribadi yang kritis. Selain kontribusinya dalam dunia akademisi, ia juga memiliki berbagai karya sastra sebagai kritik atas kondisi sosial politik yang terjadi di Tunisia. Kehidupan di Tunisia di bawah kekuasaan rezim tirani dengan berbagai masalahnya melatarbelakangi lahirnya sebagian besar karya Hussein Al-Wad, seperti novel *Rawāihul Madīnah* (2010), *Sa'ādatur ... Al-Sayyid Al-Wazīr* (2011), *Rawāihul Madīnah 2* (2015), dan *Al-Ghirbān* (2018). Semua karya ini terinspirasi dari realitas dan sejarah yang terjadi di Tunisia, khususnya pada persoalan politik, sosial, revolusi dan pasca revolusi dengan segala kemajuan dan kemundurannya (*An-Nadwah Al-Dauliyah Hussein Al-Wad Bāhitsan wa Mabda'an*, 2018). Perhatiannya terhadap kondisi masyarakat Tunisia tidak dapat diragukan lagi, melalui karya-karya tersebut ia mewakili kaum sosialis berupaya untuk meruntuhkan kapitalisme yang mengakar di Tunisia selama puluhan tahun. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Alaona Muhammad Al-Amin pada salah satu karya Hussein Al-Wad, mengungkapkan bahwa Hussein Al-Wad merupakan proletariat yang hidup di bawah kekuasaan otoriter yang membatasi kaum intelektual seperti Hussein Al-Wad, dalam membangun proyek-proyek budaya di Tunisia Al-Amin, 2020, p. 203).

Hegemoni Negara Tunisia dalam Novel *Sa'ādatur As-Sayyidul Wazīr*

Dalam pembahasan ini, hegemoni negara yang ditemukan dalam novel terbagi menjadi dua wilayah, yaitu hegemoni negara yang dijalankan oleh rezim penguasa pada wilayah masyarakat sipil dan masyarakat politik. Pembagian ini mengacu pada konsep hegemoni Gramsci tentang negara, bahwa negara terdiri dari wilayah masyarakat politik dan wilayah masyarakat sipil (Rasyid, 2011, p. 196).

Hegemoni Pada Wilayah Masyarakat Sipil

Kehidupan dan perilaku pemerintahan korup sering kali dinarasikan dalam novel melalui tokoh pemimpin negara beserta para menternya. Perilaku tersebut sudah berlangsung puluhan tahun dan disadari oleh masyarakat sipil akan tetapi rezim penguasa mengambil kebijakan tangan besi kepada siapapun yang melawannya. Hal demikian pada dasarnya bukan merupakan strategi efektif untuk mempertahankan kekuasaan yang dipengangnya, sebagaimana konsep hegemoni Antonio Gramsci bahwa strategi efektif yaitu melalui kepemimpinan intelektual daripada dominasi kekerasan (Gramsci, 2013/2011, p. 285). Ketidakefektifan strategi tersebut terlihat dari narasi dalam novel yang menandakan adanya ketidakselarasan masyarakat sipil terhadap rezim penguasa. Kondisi demikian menandakan bahwa hegemoni yang dijalankan oleh rezim penguasa berada pada tingkatan hegemoni merosot, yang mana hegemoni terdapat ancaman disintegrasi karena konflik tersembunyi di dalam masyarakat yang didorong oleh ketidakselarasan pemikiran antara massa dengan kelompok hegemonik (Hendarto, 1993, pp. 82–84). Rezim penguasa menyadari ketidakselarasan masyarakat apabila dibiarkan akan mengakibatkan disintegrasi di dalam masyarakat dan perlawanan massa terhadapnya untuk membentuk negara baru, sehingga dalam hal ini rezim penguasa melakukan strategi mengembalikan legitimasinya untuk dapat tetap berkuasa. Dalam novel terdapat dua strategi yang dilakukan oleh rezim penguasa terhadap masyarakat sipil sebagai upaya mempertahankan kekuasaan.

Pertama adalah pengangkatan guru sebagai menteri Sumber Daya Alam dan Properti. Tokoh guru dalam novel merupakan kaum intelektual dianggap oleh kalangan masyarakat sebagai pribadi yang bersih dan bermoral. Tokoh guru yang digambarkan oleh Hussein Al-Wad sebagai pria yang menentang rezim yang berkuasa melalui organisasi buruh yang dijelankannya, sehingga yang dilakukan oleh rezim penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya adalah mengangkat seorang guru sebagai menteri. Tokoh guru merupakan

orang yang menentang rezim penguasa, sehingga tidak mudah juga untuk menerima tawaran tersebut. Oleh sebab itu, perdana menteri berupaya mempengaruhi guru yang merupakan sepupunya sendiri untuk menerima tawaran rezim penguasa, bergabung dalam jajaran pemerintahan sebagai seorang menteri di kementerian Sumber Daya Alam dan Properti, sebagaimana kutipan berikut:

“وهو يقول: هذا وقت العمل. وقت انتهاز الفرص وتفتيق المواهب لمرضاة الرجل الذي وضع ثقته فيك.”

Dia berkata: Inilah saatnya bertindak. Saatnya untuk mengambil peluang dan mengasah bakat, untuk menyenangkan orang yang telah menaruh kepercayaan padamu (Al-Wad, 2011, p. 44).

“وقال: (افهمني جيدا. المسألة جد في جد. قرارات سيادة الرئيس لا يلعب بها أحد. ثم هو يعرف ما يفعل. رأى فيك الرجل المناسب فاخترتك دون آلاف غيرك ممن يحلمون بما هو دونها بآلاف المرات. ليس لقرابتي بك دخل في المسألة. وعلاقتي بك هي علاقتي بأي وزير من الوزراء)”

Dia berkata: Pahamiilah aku dengan baik. Masalah ini sangat serius. Keputusan presiden tidak dapat dipertanyakan oleh siapa pun. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Dia melihat dirimu adalah orang yang tepat, jadi dia memilihmu daripada ribuan orang lain yang memimpikan sesuatu yang seribu kali lebih kecil dari itu. Kekerabatanmu denganku tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Hubunganku denganmu adalah hubunganku dengan setiap menteri. (Al-Wad, 2011, p. 45).

Pengangkatan guru dianggap sebagai penghargaan untuk semua guru. Di dalam novel digambarkan bahwa profesi guru di Tunisia memiliki pendapatan yang cukup rendah bahkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, sehingga para guru membuka berbagai kelas khusus di rumahnya untuk memperoleh penghasilan tambahan. Dengan pengangkatan guru sebagai menteri, rezim penguasa memiliki tujuan mengubah pandangan masyarakat yang pada awalnya berpandangan bahwa para pemimpin di negara Tunisia hanya para pemilik modal yang korup dan tidak bermoral menjadi pandangan yang sebaliknya. Hal tersebut sebagaimana kutipan berikut:

“في هذا التعيين تكريم لجميع المعلمين. وفيه من المعاني السامية ما له ولا حد. فيه، من بين ما فيه، أن جميع أبناء البلد البررة قابلون لأن يكون كل واحد منهم وزيرا ومسؤولا كبيرا. المهم أن يبذل النفس والنفيس في خدمة بلده.”

“Dalam pengangkatan ini merupakan penghargaan untuk semua guru, terdapat makna luhur yang tidak ada batasnya. Di dalamnya, antara lain bahwa semua anak negeri yang berbakti semuanya dapat menjadi seorang menteri dan pejabat tinggi, yang terpenting dia mengorbankan dirinya dalam pengabdian pada negaranya.” (Al-Wad, 2011, p. 64).

Dengan masuknya seorang guru yang merupakan tokoh yang dipercaya oleh masyarakat sebagai pribadi yang bersih dan bermoral, masyarakat memiliki harapan besar terhadapnya untuk dapat memerankan fungsi intelektual dalam menjalankan hegemoni yang berlangsung dan terbentuknya hegemoni yang integral, antara aparat hegemoni dan masyarakatnya sejalan. Dalam hal ini, rezim penguasa berhasil mengembalikan kepercayaan masyarakat dalam menjalankan kepemimpinan hegemoni di negara tersebut. Hal tersebut terlihat dalam kutipan berikut:

“لم يبق أحد لم يهنئها باعتلاء زوجها كرسي الوزارة، قالت إن مدير المدرسة التي كنت أعمل بها قد هاتف بلبس موعدا مناسباً للزيارة مهنتاً رفقة جميع الزملاء.”

“Tidak ada seorang pun yang tidak mengucapkan selamat kepadanya atas kenaikan suaminya di kursi kementerian. Dia mengatakan bahwa kepala sekolah tempatku dulu bekerja telah menelpon untuk meminta waktu yang tepat untuk berkunjung dan memberikan ucapan selamat dengan rekan-rekan”. (Al-Wad, 2011, p. 54).

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat menyetujui atas keputusan rezim penguasa dengan masuknya guru ke dalam jajaran pemerintahan. Dengan itu, menandakan adanya keberhasilan strategi rezim penguasa untuk mengembalikan legitimasinya atas masyarakat sipil.

Kedua adalah penyebaran informasi palsu. Dalam mempengaruhi kepercayaan masyarakat, media menjadi sarana yang efektif bagi rezim penguasa dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadapnya. Hussein Al-Wad menggambarkan di dalam novel atas penguasaan media yang dilakukan oleh rezim penguasa. Penguasaan media tersebut digunakan oleh rezim penguasa untuk mengontrol pihak-pihak yang menentangnya dan menyebarkan informasi palsu tentang hal-hal baik yang dilakukan oleh rezim penguasa dalam menjalankan kepemimpinan di negara Tunisia. Penyebaran Informasi palsu sebagai cara rezim penguasa dalam mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadapnya, sebagaimana informasi tentang biografi guru yang diangkat sebagai menteri Sumber Daya Alam dan Properti. Tokoh guru di dalam novel tidak pernah bergabung partai rezim penguasa, bahkan guru tersebut digambarkan sebagai pribadi yang tidak pernah menyukainya dan selalu menentangnya melalui organisasi buruh yang dianutnya. Namun rezim penguasa membuat informasi tentang biografi guru atas keterlibatannya di partai tersebut dan turut berjuang di dalamnya dalam jangka waktu yang lama, sebagaimana kutipan berikut:

“عثرْتُ في التعريف بي على كلام لم أتبيّن له مراجع فيما أعرف من سيرتي الشخصية. فأنا لا أذكر أنني ناضلت طويلاً في صفوف حزب الحاكم أو أنني تفرّغت إلى التعليم أمارسه وأفكر فيه وأعدّ له خططا مستقبلية هامة.”

“Aku menemukan kalimat dalam profilku yang tidak aku ketahui referensinya dari biografi pribadiku. Aku tidak ingat bahwa aku telah berjuang dalam waktu yang lama di jajaran partai yang berkuasa atau aku mengabdikan diri untuk pendidikan, mempraktikkannya, memikirkannya, dan membuat rencana masa depan yang penting.” (Al-Wad, 2011, p. 57).

Informasi palsu tentang biografi guru tersebut disebarkan oleh rezim penguasa melalui berbagai media tanpa adanya referensi yang benar terkait pengalaman pribadi yang pernah dijalani oleh guru selama hidupnya. Hal tersebut dilakukan oleh rezim penguasa dengan tujuan memperoleh dukungan masyarakat terhadap partai yang sedang berkuasa. Selain informasi tentang biografi guru yang menjadi menteri, informasi palsu yang disebarkan oleh rezim penguasa adalah tentang data pertumbuhan ekonomi negara. Rezim penguasa memanipulasi data pertumbuhan ekonomi yang krisis menjadi pertumbuhan dengan indikator yang selalu bergerak positif dan ditampilkan di berbagai media pemerintah dan partai, sebagaimana kutipan berikut:

“نشرت الصحف الحكومية والحزبية موازنة للنمو ببلادنا كانت جميع المؤشرات فيها إيجابية. لكنّ السيد وزير المالية جعل يشير إلى الوضع الحرج الذي تمر به البلاد، حاول أن يهون من حدّته بالمقارنة بأوضاع بلدان إفريقية.”

“Surat kabar pemerintah dan partai menerbitkan anggaran untuk pertumbuhan negara kita di mana semua indikatornya positif. Namun, anggaran yang dibuat Menteri Keuangan menunjukkan pada situasi kritis yang sedang dialami negara, dan dia mencoba meremehkan keparahannya dibandingkan dengan kondisi negara-negara Afrika.” (Al-Wad, 2011, p. 220).

Manipulasi data negara tentang situasi ekonomi tersebut bertujuan untuk menutupi dari masyarakatnya terkait kerugian negara akibat korupsi yang tersebar di mana-mana yang menyebabkan krisis ekonomi dalam negara. Hal demikian, sebagaimana yang terjadi di Tunisia pada masa kepemimpinan Zainal Abidin bin Ali. Menurut Raghieb. Pada masa itu Zainal Abidin bin Ali berulang kali menyampaikan informasi kepada masyarakat bahwa ekonomi Tunisia baik-baik saja, dan dia mengagungkan pencapaian yang telah dilakukannya pada negara yang dianggapnya sebagai keajaiban ekonomi. Padahal, situasi ekonomi di Tunisia menunjukkan situasi kritis dan semakin memburuk (As-Sirjani, 2011, p. 83).

Hegemoni Pada Wilayah Masyarakat Politik

Masyarakat politik di dalam novel diwakili oleh tokoh-tokoh aparat pemerintah yang di dalamnya terdapat visi politik yang diberlakukan. Sebagaimana menurut Gramsci dalam Giacomo dan Giorgos, bahwa masyarakat politik merupakan wilayah kelas penguasa, dan jika kelas penguasa ingin mempertahankan kekuasaannya, maka ia juga harus menjalankan hegemoninya dalam ruang sosial masyarakat sipil (D'Alisaa dan Kallis, 2016, p. 232). Dalam novel *Sa'adatuhuu As-Sayyidul Wazir* hegemoni yang dijalankan oleh rezim penguasa terjadi pada wilayah masyarakat politik.

Ancaman rezim penguasa terhadap menteri Sumber Daya Alam dan Properti untuk melikuidasi sektor-sektor publik. Krisis ekonomi tidak dapat dipisahkan dari rezim penguasa yang korup. Untuk mengatasi masalah tersebut rezim penguasa melakukan likuidasi sektor-sektor publik yang terperosok dalam kerugian dan hutang, serta memutus para pekerja di dalamnya untuk melakukan privatisasi. Hal tersebut menyebabkan para buruh kehilangan mata pencahariannya. Rezim penguasa beranggapan bahwa sektor-sektor publik tersebut sudah tidak lagi efektif sebagai mesin penggerak ekonomi negara. Solusi yang diambil oleh rezim penguasa untuk melikuidasi sektor-sektor publik yang semakin merugi dan terlilit hutang tidaklah salah, namun proses pelaksanaannya terjadi banyak suap dan korupsi yang dilakukan oleh para pemimpin negara, sehingga hal tersebut menyebabkan negara semakin rugi dan pengangguran di kalangan masyarakat semakin menyebar luas. Hal tersebut, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Hussein Al-Wad dalam wawancaranya dengan Nauri Gana, bahwa solusi yang diambil oleh rezim penguasa dalam melikuidasi sektor-sektor publik yang merugi tidaklah salah, akan tetapi realisasinya telah menyebabkan korupsi yang meluas, dalam melikuidasi sektor publik didikte oleh mentalitas perampasan dalam memenangkan uang publik yang menyebabkan situasi ekonomi di negara semakin memburuk (Gana, 2014).

Menteri Sumber Daya Alam dan Properti menyadari hal tersebut, bahwa dengan melikuidasi pabrik hanya akan menguntungkan para pemimpin negara dan merugikan masyarakatnya. Sebagaimana yang saya jelaskan di awal, bahwa menteri tersebut sebelumnya adalah seorang guru yang tergabung dalam organisasi buruh dan menjadi penentang rezim penguasa, sehingga dia menolak rencana untuk melikuidasi sektor-sektor publik. Penolakan tersebut merupakan upaya menteri memerankan fungsi kaum intelektual yang mewakili masyarakat dalam menegosiasikan kepentingan masyarakat terhadap aparat-aparat hegemoni, namun yang terjadi menteri tersebut tidak berhasil dalam memerankan fungsi tersebut karena adanya ancaman yang diberikan oleh rezim penguasa melalui perdana menteri. Ancaman yang dilakukan oleh perdana menteri terhadap menteri Sumber Daya Alam dan Properti terlihat pada kutipan berikut:

“لم أسترد أنفاسي من أتعاب المؤتمر ومتاعبه حتى بدأ ابن خالتي يستحثني على مزيد التقدم في التفريط في المعامل والمصانع والشركات والمؤسسات التي ينبغي التفريط فيها. رجوته أن يمهلني أياما أحظى فيها بشيء من الاستجمام فلم يقبل. قال لي: ((تظن نفسك من؟ إياك والغلط في نفسك! أنت في خدمة الدولة)). بلعت التهديد.”

“Aku tidak pulih dari biaya dan permasalahan konferensi, sampai sepupuku mulai mendesakku untuk membuat kemajuan lebih lanjut dalam menjual pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan dan institusi-institusi yang harus dibuang. Aku memohon padanya beberapa hari untuk berlibur, tapi dia tidak menerima. Dia berkata kepadaku: ((Kamu pikir kamu siapa? Hati-hatilah pada kesalahanmu sendiri! Kamu berada dalam pelayanan negara)). Aku menelan ancaman.” (Al-Wad, 2011, p. 150).

Dengan ancaman tersebut, pada akhirnya menteri Sumber Daya Alam dan Properti memenuhi rencana rezim penguasa untuk melikuidasi sektor-sektor publik melalui kementeriannya, sebagaimana kutipan berikut:

“أبلغت رئيس ديواني أنني قرّرت إشهار المصنع الكبير للبيع. ظهر عليه اندهاش قوَى، قال: ((ألم يكن الرأي أن نبدأ بالمعامل والشركات والمصانع الصغيرة حتى يعتاد الناس على التفريط في الممتلكات التي عاشوا طويلا على أنها لهم؟)).”

“Aku menyampaikan kepada kepala stafku bahwa aku memutuskan akan mengumumkan pabrik besar untuk dijual. Sebuah keheranan muncul padanya, dia berkata: ((Apakah kita tidak mempertimbangkan untuk memulai dengan perusahaan-perusahaan dan pabrik-pabrik kecil terlebih dahulu agar orang-orang terbiasa kehilangan sektor-sektor yang telah lama mereka jalani sebagai milik mereka?)).” (Al-Wad, 2011, p. 181).

Dalam hal demikian, sehingga dapat dikatakan bahwa menteri Sumber Daya Alam dan Properti hanya menjadi kambing hitam bagi rezim penguasa di wilayah masyarakat politik. Seorang menteri yang pada awalnya merupakan lawan rezim tidak lagi dapat menjalankan fungsi kaum intelektual dalam memperjuangkan dan mengosiasikan kepentingan masyarakat, melainkan turut berpartisipasi dalam rencana-rencana busuk rezim penguasa terhadap masyarakat.

Dalam upaya mempertahankan hegemoni yang sedang berlangsung, partai yang dipimpin oleh presiden memiliki kendali penuh atas partai-partai lainnya dalam menjalankan kepemimpinan di negara Tunisia. Hadirnya partai-partai lainnya memang menjadi bukti rezim penguasa dalam menjalankan sistem multipartai di negara tersebut untuk mewakili berbagai kalangan dalam mengatur dan mengelola negara, namun realitanya kendali tersebut dipegang penuh oleh partai milik rezim penguasa, partai-partai lainnya hanya sebagai partisipan yang tunduk kepada rezim penguasa, tidak ada pihak yang nyata dalam menentang rezim dan benar-benar mewakili aspirasi masyarakat.

Menteri Sumber Daya Alam dan Properti menyadari permasalahan tersebut. Namun karena kuatnya rezim penguasa dia tidak dapat mengeluarkan kritik satu pun terhadap rezim kecuali hanya berkata pada dirinya sendiri tentang permasalahan dialami oleh negara, sebagaimana kutipan berikut:

“لو كان عندنا أحزاب حقيقية أخرى معارضة أو مخالفة كان للانتماء معنى. أما أن تكون وحدك في السباق فحديثك عن الفوز والمنافسة والكسب هو الحمق عينه.”

“Jika kita memiliki partai-partai lain yang menentang atau melawan, maka afiliasi

itu akan memiliki arti. Adapun kamu sendirian dalam perlombaan, pembicaraanmu tentang kemenangan, persaingan, dan keberhasilan sama saja dengan kebodohan.” (Al-Wad, 2011, p. 67).

Dalam hal ini, Hussein Al-Wad menggambarkan sistem partai yang dijalankan oleh rezim penguasa pada masa presiden Zainal Abidin bin Ali. Negara Tunisia sebelum masa kepemimpinan Bin Ali memakai sistem partai politik tunggal, dan sejak masa kepemimpinannya menjadi sistem multipartai. Oleh karena itu, pada masa Zainal Abidin bin Ali muncul berbagai macam partai di negara Tunisia. Namun nyatanya, peta politik Tunisia hanya mengetahui penguasaan satu partai, yaitu partai RCD yang diketuai oleh Zainal Abidin bin Ali, dan partai tersebut memiliki kekuasaan mutlak selama beberapa periode berturut-turut, sejak Ben Ali mengambil alih kekuasaan di Tunisia (As-Sirjani, 2011, p. 78).

Realitas dan Persoalan Sosial dalam Novel *Sa'adatuhu As-Sayyidul Wazir*

Dalam novel *Sa'adatuhu As-Sayyidul Wazir*, rezim penguasa memegang kekuasaan negara dalam kurun waktu yang cukup lama. Selama rezim tersebut berkuasa negara dihadapkan oleh berbagai masalah. Kepemimpinan yang dijalankan mengabaikan kepentingan dan aspirasi masyarakatnya. Dalam kondisi demikian masyarakat mulai tidak percaya lagi terhadap kekuasaan yang ada, sehingga pada akhirnya terdapat ketidaksielarasan antara masyarakat dengan kepemimpinan yang ada. Ketidaksielarasan tersebut ditemukan dalam novel pada beberapa hal.

Korupsi yang Merajalela

Korupsi sudah menjadi hal yang biasa bagi rezim yang berkuasa, sehingga dapat berdampak pada hilangnya kepercayaan dari masyarakat dan menjadi ancaman terhadap kekuasaan yang dijalanannya. Hal tersebut tampak jelas dari tanggapan tokoh istri seorang guru atas berita tentang sepupu suaminya yang diangkat menjadi perdana menteri oleh presiden, sebagaimana kutipan berikut:

“تنهدت بحرقه ثم لوت شفيتها وقالت: (يزدادون فسادا فيزدادون ارتقاء، لم يعد للاستقامة ونظافة اليد سوق في هذا البلد).”

“Dia menarik nafas panjang dengan sesak, kemudian meringkuk bibirnya dan berkata: (Mereka semakin korup dan mereka semakin tinggi, kejujuran dan kebersihan tangan tidak lagi dipasarkan di negara ini).” (Al-Wad, 2011, p. 43).

Pengangguran yang Semakin Meningkat

Masyarakat memiliki harapan besar terhadap rezim penguasa dalam mengatasi pengangguran yang terjadi di Tunisia, namun realitanya tingkat pengangguran semakin meningkat. Bahkan lulusan sarjana yang masih menganggur karena lapangan pekerjaan yang sangat sulit ditemukan di negara tersebut. Dalam kondisi ini, banyak sekali masyarakat yang terperosok ke dalam kemiskinan. Sementara itu rezim yang berkuasa tidak peduli atas kondisi tersebut, kecuali hanya membuat janji untuk mengatasi, tanpa menepatinya. Permasalahan tersebut terlihat jelas dari isi surat yang ditujukan kepada seorang menteri baru dari seorang janda miskin yang memiliki banyak anak, namun tidak satu pun di antara anak-anaknya yang memperoleh pekerjaan, sebagaimana kutipan berikut:

“يا سيدي الوزير، يا صاحب العقل الرشيد والفكر السديد. يا صاحب القدرة والجاه. اني المواطنة سالحة بنت... أرملة. عندي سبعة أبناء، أربعة ذكور يلبسون الجدار وثلاث إناث عوانس. أترجأكم أن ترحموني بتشغيل واحد أو واحدة منهم. وعدنا السيد المستعد خيرا منذ أعوام ولم نر شيئا.”

“Wahai Pak Menteri, pemilik akal dan pikiran yang baik, pemilik kekuasaan dan prestise. Saya warga yang baik, seorang gadis... seorang janda. Saya memiliki tujuh anak, empat laki-laki berpakaian tembok dan tiga perempuan perawan tua. Tolong, kasihanilah saya dengan memperkerjakan salah satu dari mereka. Tuan yang berencana hal-hal baik telah berjanji pada kami sudah bertahun-tahun yang lalu, namun kami belum melihat apa-apa.” (Al-Wad, 2011, p. 70).

Kutipan tersebut memiliki hubungan dengan masalah pengangguran yang dialami oleh masyarakat Tunisia pada masa kepemimpinan Zainal Abidin bin Ali yang memegang kekuasaan negara selama bertahun-tahun. Tingkat pengangguran pada masa itu sangat tinggi sehingga menyebabkan meluasnya kemiskinan di kalangan masyarakat. Tingkat pengangguran selama periode Zainal Abidin bin Ali meningkat dari 13,1% pada tahun 1984 menjadi 16,1% pada tahun 1993. Pada dekade pertama abad ke 21, pengangguran menyebar sampai pada kalangan lulusan universitas, dan sangat berdampak buruk pada keutuhan kehidupan masyarakat. Pengangguran lulusan universitas meningkat dari 8,6% pada tahun 1999 menjadi 19,0% pada tahun 2007. Menurut data baru setelah revolusi Tunisia, terungkap bahwa pengangguran lulusan universitas mencapai 44,3% pada tahun 2010 (Görmüş dan Akçalı, 2020).

Perampasan Hak-hak Warga Negara

Selain pengangguran yang terjadi di kalangan masyarakat, perampasan hak-hak warga negara juga sering kali terjadi pada masa itu. Hak-hak warga negara dirampas oleh para pemimpin yang berkuasa demi kepentingan pribadi melalui kebijakan-kebijakan yang telah dibuatnya. Hal tersebut sudah menjadi hal yang biasa bagi para pemimpin yang berkuasa, mereka dapat melegalkan tindakan-tindakan tersebut melalui dokumen-dokumen palsu yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga negara yang terkait. Sebagaimana laporan kepada seorang menteri baru yang dibuat oleh tokoh Abdul Wahab sebagai warga negara Tunisia yang kehilangan haknya, dirampas oleh kepala divisi partai menggunakan dokumen palsu, namun rezim penguasa tidak peduli atas perampasan hak warga negara tersebut, sebagaimana kutipan berikut:

“يا صاحب اليد الطويلة والقلب الرحيم والأخلاق الفوّاحة. إني المواطن عبد الوهاب... أتوسّل إليكم ودموع الرجاء تملأ عيني بأن تتصفوني وتعيدون (كذا) لي حقي الضائع. انسدت في وجهي جميع الطرق وأظلمت الأفاق. عندي طبة، أرض ورثتها عن أجدادي في موقع ممتاز. انتزعها مني رئيس الشعبة الحزبية بوثائق مزوّرة. رفعت عليه قضايا. من عشرة أعوام وأنا أخاصم والحكام لا يسمعون.”

“Wahai pemilik tangan panjang, penyayang hati, dan pancaran akhlak. Saya adalah warga negara, Abdul Wahab... Saya mohon, dengan air mata yang penuh harap, agar anda bersikap adil kepada saya dan dapat mengembalikan hak saya yang hilang. Semua jalan terhalang di wajahku, dan cakrawala menjadi gelap. Saya memiliki sepetak tanah, tanah yang diwarisi nenek moyang saya terletak di lokasi yang strategis. Kepala divisi partai merampas tanah itu dari saya dengan dokumen palsu. Saya sudah mengangkat kasus itu, sudah dari sepuluh tahun yang lalu saya mengadu dan para penguasa tidak ada yang mendengar.” (Al-Wad, 2011, p. 71).

Hal itu juga menunjukkan bahwa para pemimpin negara Tunisia dalam menjalankan kekuasaannya bersikap sewenang-sewenang terhadap masyarakat tanpa memperhatikan kepentingan atau aspirasi-aspirasi masyarakatnya, dengan itu dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan yang ada. Ketidakselarasan tersebutlah yang menyebabkan hegemoni berada pada tingkatan hegemoni merosot, bah-

wa para pemimpin negara kehilangan kepercayaan dari masyarakatnya, dan masyarakat dapat dimungkinkan akan mencari kesepakatan lain yang tidak sejalan dengan kepemimpinan yang ada. Apabila kondisi ini dibiarkan maka dapat menyebabkan hegemoni yang dijalankan terperosok pada tingkatan hegemoni minimum, yakni masyarakat akan melakukan perlawanan terhadap kepemimpinan hegemoni yang ada dan berpotensi akan menyebabkan keruntuhan kekuasaan yang sedang dipegang oleh rezim penguasa.

KESIMPULAN

Urgensi tentara militer perempuan di Arab Saudi adalah untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik. Tentara militer perempuan Arab Saudi berperan sebagai aktor non kombatan, dimana menjalankan tugasnya sebagai pendukung dan pelindung segmentasi masyarakat tertentu, seperti perempuan dan anak-anak. Penyebaran militer perempuan di Arab Saudi dikhususkan pada aspek pertahanan, keamanan umum, polisi, imigrasi, pusat operasi terpadu, lembaga pelatihan, dan lalu lintas.

Peran perempuan dalam militer tersebut merupakan implementasi dari *Vision 2030 Kingdom of Saudi Arabia*, yaitu memberi kesempatan untuk perempuan dalam beraktivitas di sektor publik. Hal ini merupakan manifestasi dari peningkatan sumber daya manusia, khususnya pemuda. Disamping itu juga merupakan upaya peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat, termasuk pengunjung yang melakukan wisata religi.

Eksistensi tentara militer perempuan merupakan agen perdamaian, yaitu aktor yang berperan dalam menjaga stabilitas keamanan dan terciptanya kedamaian kawasan. yang sengaja dikembangkan Pemerintah Arab Saudi sebagai suatu sistem yang memiliki kinerja yang terus berkembang untuk ranah-ranah tertentu. Perempuan memiliki karakteristik yang mampu menjamah rasa aman dan sensitivitas yang juga berguna untuk menjaga stabilitas keamanan. Sistem syariat yang menjadi pedoman sistem pemerintahan Arab Saudi tidaklah berubah, tetapi mengalami modernisasi untuk memenuhi pelayanan masyarakat. Hal ini berpengaruh signifikan terhadap kebijakan negara Arab Saudi dan dampaknya terhadap citra politik Arab Saudi sebagai negara monarki konservatif.

Rezim Pangeran MBS menyatakan bahwa Vision 2030 Kingdom Arab Saudi berlandaskan budaya arab dan nilai-nilai Islam sebagai jantung peradaban di Arab Saudi. Sehingga militer perempuan Arab Saudi masih mempertahankan prinsip syariah sebagai instrumen politik. Pemberdayaan militer perempuan Arab Saudi merupakan wujud dalam peningkatan kapasitas dan kualitas sistem keamanan di Arab Saudi sebagai jantung Timur Tengah yang banyak dikunjungi umat muslim di dunia.

DAFTAR REFERENSI

- Affan, M. (2018). Arab spring dalam sastra Arab: Ekspresi dan representasi. *Al Irfan*, 1.
- Al-Amin, A.M. (2020). Al-Mutsaqqif wa Shirā' Al-Īdiyūljijyā fi Riwayah "Al-Ghirbān" li Hussein Al-Wad. *Majallah Ihālāt*, No. 5, 203.
- Al-Alekso Tan'ā Al-Akādīmī wa Al-Nāqid wa Al-Rawāiy Al-Tūnisī Al-Duktūr Hussein Al-Wad. (2018, June). *ALECSO*. <http://www.alecso.org/nnsite/2016-02-02-13-47-43/2040-2018-06-05-09-26-43.html>
- Ammar, H.B. (2013). *Riwayah Sa'adatuhu As-Sayyidul Wazir Namudzajan li Khuruj al-Ibdā' at-Tūnisiy min 'Unuq az-Zujājah*. Assabah. turess.com/assabah/96211.
- Annisa, L., Arifany, W. (2019). *Representasi kondisi sosial negara Tunisia dalam syi'ir احترام للفقير كقري بلادي لا احترام للفقير karya Anis Syaussyan prespektif Alan Swingewood*.
- Al-Salem, F. S. (2013). *Sa'adatuhu As-Sayyidul Wazir*. Al-Jaridah. aljarida.com/articles/1462286148966425400.
- Al-Tarhouni, S. (2018). *Rahil Al-Syā'ir wa Al-Ruwāiy Al-Tūnisiy (Hussein Al-Wad)*”.

- Tunisien. <http://www.tunisien.tn/>
- Al-Wad, H. (2011). *Sa'ādātuḥu As-Sayyidul Wazīr*. Dār Al-Janūb li Al-Nasyr.
- Al-Zain, H. M. (2013). *Al-Rabī' Al-'Arabiy*. Dār al-Qalm al-Jadīd.
- Ali, S. A. A. Bin. (n.d.). *Ar-Riwāyah Takhla'u Tārīkhihā*. Nousos. <https://nousos.com/?p=3333>
- Altmara, A. M. (2016). *سيرة الفساد الحكومي: قراءة في رواية سعادته... السيد الوزير لحسين الواد*. Almandumah. <https://search.mandumah.com/Record/978404/Description>
- An-Nadwah Al-Dauliyah Hussein Al-Wad Bāhitsuḥ wa Mabda'an*. (2018). Markaz Dhiyā' Li Al-Muktamarāt Wa Al-Abhāts. <https://www.diae.events/events/64455>
- As-Sirjani, R. (2011). *Qisshah Tūnis min al-Bidāyah ilā al-Tsauroh*. Dār Aqlām li al-Nasyr wa al-Tawzī' wa al-Tarjamah.
- Carranza, R., Zouari, M.A. (2020). *Work, freedom, dignity: For young Tunisians, the revolution was not only about accountability for corruption*. International Center for Transitional Justice (ICTJ).
- D'Alisaa, G. Kallis, G. (2016). A Political ecology of maladaptation: Insights from a Gramscian theory of the state. *Global Environmental Change*, 38. <http://dx.doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2016.03.006%0A>
- Daud, S. (2016). *The Dump*. <https://www.wordswithoutborders.org>. <https://www.wordswithoutborders.org/graphic-lit/january-2016-arabspring-the-dump>
- Diagnostic, S. C. (2015). *Tunisia. June*.
- Endraswara, S. (2003). *Metodologi penelitian sastra: Epistemologi, model, teori, dan aplikasinya*. Pustaka Widayatama.
- Fadhil, A., Sangidu, S., Manshur, F.M. (2017). Changes of religious behaviours: Sociological analysis of literature of the novel Al-Thaliyāniy by Syukrī Al-Mabkhūt. *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 13(1).
- Gana, N. (2014). *Al-Ādab wa Al-Tsaurah: Hiwār ma'a Hussein Al-Wad bi Munāsabah Al-Dzīkr Al-Tsālitsuḥ li Al-Tsaurah Al-Tunisiyah*. Jadaliyah. <https://www.jadaliyya.com/Details/30109>
- Gherib, B. (2020). Revolution and transition in Tunisia as crises of hegemony. *The Journal of North African Studies*, Agustus.
- Görmüş, E. Akçalı, E. (2020). Variegated forms of embeddedness: Home-Grown neoliberal authoritarianism in Tunisia under Ben Ali. *Journal of International Relations and Development*. <https://doi.org/10.1057/s41268-020-00196-7>
- Gramsci, A. (2013). *Prison Notebooks: Catatan-catatan dari penjara*. (Teguh W. U., trans). Pustaka Pelajar (Work originated 2011).
- Hanawi, N. (2021). Al-Duktūr Hussein Al-Wad wa Al-Riwāyah Al-Inbitsāqiyah. *Al-Adab*, 21(01), 32.
- Hendarto, H. (1993). *Mengenal konsep hegemoni Gramsci dalam diskursus kemasyarakatan dan kemanusiaan*. Gramedia.
- Jaquette, E., Youssef, N. (2016). *The Arab Spring, five years*. Words Without Borders. <https://wordswithoutborders.org/read/article/2016-01/january-2016-captivity-the-arab-spring-five-years-on/>
- Rasyid, A. (2011). *Gharāmsyi wa Qadhāyā Al-Mujtama' Al-Madanī*. Markaz Al-Buhūts Al-Arabiyah.

Ratna, N. K. (2013). *Teori metode dan teknik penelitian sastra*. Pustaka Pelajar.

Riahi, K. (2012). *Al-Wād Yaqtahimu Malaff al-Fasād Riwaīyan*. Aljazeera. aljazeera.net/news/cultureandart/2012/12/14

Semi, M.A. (2012). *Metode penelitian sastra*. Angkasa.

Wellek, R., Warren, A. (1989). *Teori kesusastraan (terj.)*. Gramedia.

